

The Manager Review

Jurnal Ilmiah Manajemen

Deskripsi Konseptualisasi Penilaian Kinerja Kasatker di Spripim Polda Bengkulu

*Hendra N.S. Tambunan
Fahrudin Js Pareke
Handoko Hadiyanto*

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Puskesmas Se- Kabupaten Seluma

*Joni Raja Gukguk
Fahrudin Js Pareke
Nasution*

Kinerja Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu

*Winry Vient Eka Deni
Sigit Nugroho
Praningrum*

Evaluasi Atas Pengelolaan Barang-Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

*Posma Hutapea
Ridwan Nurazi
Paulus Sulluk Kananlua*

Analisis Pengaruh Motivasi Kerja, Komitmen Karyawan, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Pundi Bengkulu

*Ida Ayu Made E.M.G.
Sigit Nugroho
Praningrum*

Pengaruh Kepribadian Terhadap Kepuasan Kerja (Studi Empiris Pada Mahasiswa MM, MH, dan MPP Universitas Bengkulu)

*Kuswahyudi
Fahrudin Js Pareke
Muhartini Salim*

Analisis Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada PT. BPR Dian Binarta Arga Makmur Bengkulu Utara

*Leny Dwi Jayanti
Lizar Alfansi
Sularsih Anggarawati*

Pengaruh Perilaku Pemimpin dan Kemampuan Kerja Pegawai Terhadap Kinerja Pegawai Di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur

*Merta Kusuma
Willy Abdillah
Sri Warsono*

Studi Deskriptif Penerapan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Kinerja Pamong Belajar di Kantor Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Seluma

*Yudha Samba Wijaya
Ridwan Nurazi
Nasution*

Analisis Pengaruh Karakteristik Individu, Lingkungan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bengkulu

*Martopan
Fahrudin Js Pareke
Sularsih Anggarawati*



The Manager Review

Jurnal Ilmiah Manajemen

Penanggung-jawab : Prof. Lizar Alfansi, SE., MBA., Ph.D.

Ketua Dewan Redaksi : Dr. Slamet Widodo, MS

Sekretaris Dewan Redaksi : Sugeng Susetyo, S.E., M.Si

Dewan Redaksi:

1. Prof. Dr. Firmansyah
2. Prof. Dr. Darwin Sitompul
3. Prof. Dr. Yasri
4. Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.M.
5. Dr. Ridwan Nurazi, SE., M.Sc., Ak.
6. Dr. Fahrudin Js Pareke, S.E., M.Si.
7. Dr. Effed Darto Hadi, S.E., M.B.A.
8. Dr. Willy Abdillah, S.E., M.Sc

Staf Pelaksana:

1. Berto Usman, S.E., M.Sc.
2. Karona Cahya Susena, S.E., M.M.

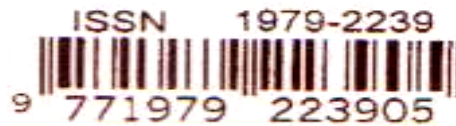
**SEMUA TULISAN YANG ADA DALAM JURNAL PENELITIAN BUKAN MERUPAKAN
CERMINAN SIKAP DAN ATAU PENDAPAT DEWAN REDAKSI
TANGGUNGJAWAB TERHADAP ISI DAN ATAU AKIBAT DARI TULISAN TETAP
TERLETAK PADA PENULIS**

Alamat Redaksi

**Program Pascasarjana Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu
Jl. W.R Supratman, Kandang Limun Bengkulu
Telpon 0736-21170**

The Manager Review

Jurnal Ilmiah Manajemen



Volume 15, Nomor 4, Oktober 2013

DAFTAR ISI

- Deskripsi Konseptualisasi Penilaian Kinerja Kasatker di Spripim Polda Bengkulu 571 - 582
Hendra Nata Sastra Tambunan
Fahrudin Js Pareke
Handoko Hadiyanto
- Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 583 - 593
Puskesmas Se- Kabupaten Seluma
Joni Raja Gukguk
Fahrudin Js Pareke
Nasution
- Kinerja Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu 594 - 603
Winry Vient Eka Deni
Sigit Nugroho
Praningrum
- Evaluasi Atas Pengelolaan Barang-Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana 604 - 615
Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012
Posma Hutapea
Ridwan Nurazi
Paulus Sulluk Kananlua
- Analisis Pengaruh Motivasi Kerja, Komitmen Karyawan, dan Lingkungan Kerja 616 - 627
Terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Pundi Bengkulu
Ida Ayu Made Er Meytha Gayatri
Sigit Nugroho
Praningrum
- Pengaruh Kepribadian Terhadap Kepuasan Kerja 628 - 641
(Studi Empiris Pada Mahasiswa MM, MH, dan MPP Universitas Bengkulu)
Kuswahyudi
Fahrudin Js Pareke
Muhartini Salim

- Analisis Pelaksanaan Pemberian Kredit Pada PT. BPR Dian Binarta Arga Makmur 642 -649
Bengkulu Utara
Leny Dwi Jayanti
Lizar Alfansi
Sularsih Anggarawati
- Pengaruh Perilaku Pemimpin dan Kemampuan Kerja Pegawai Terhadap Kinerja 650 - 664
Pegawai Di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur
Merta Kusuma
Willy Abdillah
Sri Warsono
- Studi Deskriptif Penerapan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Kinerja 665 - 673
Pamong Belajar di Kantor Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Seluma
Yudha Samba Wijaya
Ridwan Nurazi
Nasution
- Analisis Pengaruh Karakteristik Individu, Lingkungan Kerja dan Motivasi 674 - 683
Terhadap Kinerja Pegawai Pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi
Bengkulu
Martopan
Fahrudin Js Pareke
Sularsih Anggarawati

EVALUASI ATAS PENGELOLAAN BARANG-BARANG MILIK NEGARA YANG BERASAL DARI DANA DEKONSENTASI DAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2012

Posma Hutapea, Ridwan Nurazi, Paulus Sulluk Kananlua

*Program Pascasarjana Magister Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
Jalan W.R Supratman, Kandang Limun, Bengkulu 38371A*

ABSTRACT

The objective of the study is to determine the implementation of state property management on deconcentration and support funds of provincial treasury offices Bengkulu. The kind of research is a descriptive analysis, Which is needed to determine the extent of implementation of state property management from Deconcentration and Co-Administration funds based on the Government Regulation No.6 of 2006 and Government Regulation No.7 of 2008 as the level of discretion and implementation.

In this study, the authors conducted secondary data analysis by using financial statements of working unit level areas that received deconcentration and co-administration of funds in 2012. Furthermore, research method of data collection in this research is using documents that records the required data from the financial statements. In this study, the data is depicted by the fact that there is, especially on education DK/TP district level UAPPA/B-W DK/TP scope DJPB Office of Bengkulu Province.

The results show that there are 74 unit DK/TP Level UAPPA/B Region W DK/TP had against the rule, with 121 on education level Unit UAKPA/B DK/TP after an evaluation. Then as many as 38 SKPD DK/TP level UAPPA/B region-W DK/TP had against the rule with 41 on education DK/TP Unit Level work. Accordance to the provisions, as many as 36 SKPD DK/TP level UAPPA region /BW DK/TP with 80 Task Forces on education level UAKPA/B DK/TP are not appropriate or infringe the provisions.

Key words: *Management of state property from Deconcentration and Co-Administration of Funds.*

PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, Ketetapan MPR Nomor: XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, merupakan awal dimulainya reformasi total desentralisasi fiskal. Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah semakin besar dalam mengelola pemerintahannya termasuk pengelolaan keuangan, sehingga sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi serta Tugas Pembantuan.

Dekonsentrasi (DK) adalah pelimpahan wewenang/urusan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu sedangkan Tugas Pembantuan (TP) adalah

penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

Pelaksanaan asas Dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tingkat Provinsi, sedangkan penyelenggaraan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan pemerintah pusat kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tingkat Kabupaten/Kota. Sebagai implementasi dari kegiatan DK/TP maka timbullah dana DK/TP, yang selain berupa belanja akan menyebabkan timbulnya aset yang diperoleh dari dana DK/TP yang disebut dengan aset DK/TP.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya (KSAP, 2010).

Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau dari perolehan lainnya yang sah, sehingga merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik yang tidak hanya berupa proses administratif semata tetapi dalam mengelola atau menatausahakan aset tersebut. Sebagai organisasi sektor publik baik pusat maupun daerah, maka pemerintah wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan BMN/D kepada rakyatnya melalui parlemen, yang tercermin dalam pengelolaan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip *good governance* dalam penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang berbasis kinerja.

Sebagai entitas pelaporan maka Pemerintah Pusat maupun Daerah setiap periode pelaporan berakhir wajib menyampaikan laporan keuangan sebagai bagian pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. Laporan Keuangan berkenaan disusun melalui proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja serta transaksi yang berasal dari pembiayaan, dimana informasi tentang aset yang merupakan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) memberikan sumbangan yang sangat besar di dalam laporan keuangan berkenaan, secara khusus neraca yang berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap dan aset lainnya, untuk itu maka Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengamanan terhadap BMN/D yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum.

Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas BMN/BMD, hal mana selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan, sehingga informasi yang disusun dan disampaikan dalam laporan keuangan pemerintah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuat satu sistem

yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: PMK-171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor: PMK-235/PMK.05/2011 tentang Perubahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat disebut dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan Pemerintah Pusat atau dengan kata lain merupakan sistem yang digunakan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SA-BUN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (*Chief Financial Officer/CFO*), sedangkan SAI dilaksanakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Teknis selaku *Chief Operational Officer (COO)*.

Tujuan dari SAPP adalah untuk:

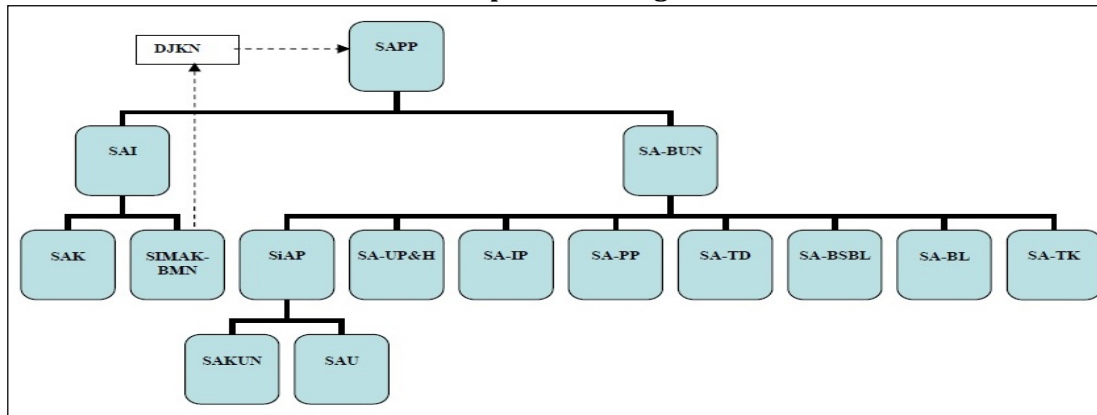
1. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktek akuntansi yang diterima secara umum.
2. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan
4. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien.

Sistem akuntansi ini berlaku untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Pusat dan SKPD yang mendapatkan dana DK/TP dari APBN serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan, namun tidak mencakup:

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD).
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Perusahaan Perseroan dan Perusahaan Umum.

Adapun Kerangka Umum SAPP secara lengkap digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-171/PMK.05/2007

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (*Chief Financial Officer/CFO*). SA-BUN memiliki 9 (sembilan) subsistem yang meliputi:

1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP).
2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SA-UP).
3. Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH).
4. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP).
5. Sistem Akuntansi Pemberian Pinjaman dan Penerusan Pinjaman (SAPPPP).
6. Sistem Akuntansi Transfer Daerah (SA-TD).
7. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL).
8. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK).
9. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL).

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi keuangan pada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) yang terdiri dari 2 (dua) Sub-Sistem;

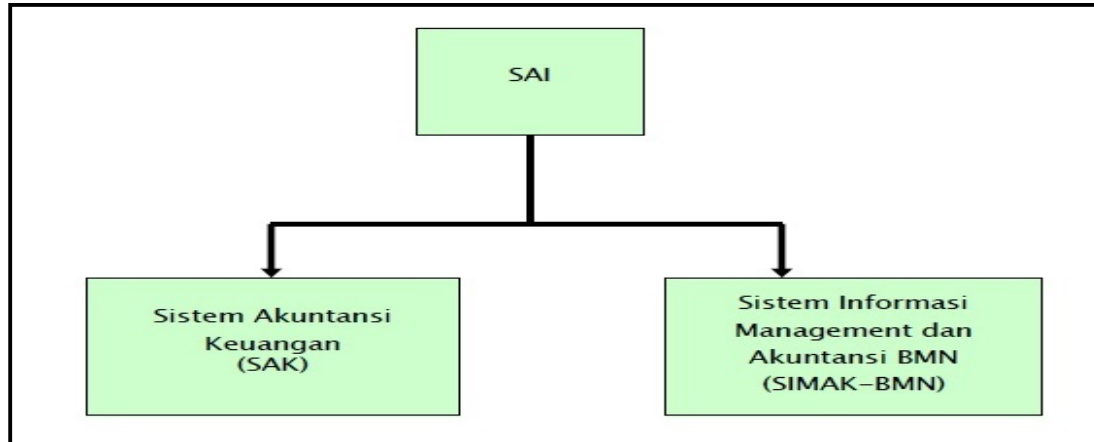
1. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca Kas Umum Negara (KUN)
2. Sistem Akuntansi Umum (SAU) yang menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Pusat dan Neraca

SiAP yang merupakan sub sistem dari SA-BUN yang akan dipergunakan sebagai suatu internal check terhadap SAI dengan cara secara dilakukan rekonsiliasi. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI dilaksanakan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga Teknis selaku *Chief Operational Officer (COO)*. SAI memiliki 2 (dua) subsistem yaitu:

1. Sistem Akuntansi Keuangan (SAK)
2. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAKBMN).

SAK dan SIMAK-BMN dilaksanakan secara sinergis untuk menghasilkan Laporan Keuangan. SAK digunakan untuk memproses transaksi anggaran dan realisasinya untuk menghasilkan LRA dan Neraca. SIMAK-BMN memproses transaksi perolehan, perubahan, dan penghapusan BMN untuk mendukung SAK dalam rangka menghasilkan neraca. Di samping itu, SIMAK-BMN menghasilkan berbagai laporan, buku-buku, serta kartu-kartu yang memberikan informasi manajerial dalam pengelolaan BMN. Sinergis SAK dan Simak-BMN dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. Sistem Akuntansi Instansi



Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-171/PMK.05/2007

Lebih lanjut didalam didalam PMK Nomor: 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor: PMK-235/PMK.05/2011 tentang Perubahan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat disebut dengan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), Perdirjen Perbendaharaan Nomor: PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor: Per-55/PB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga menyatakan bahwa dalam pelaksanaan baik SAK maupun SIMAK-BMN membentuk dan menunjuk unit akuntansi di dalam organisasinya, yang terdiri dari:

1. Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga;
2. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) pada tingkat Eselon I;
3. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) pada tingkat wilayah;
4. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) pada tingkat satuan kerja.

Unit-unit akuntansi instansi tersebut melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan BMN sesuai dengan tingkat organisasinya dan laporan BMN yang dihasilkan merupakan bentuk pertanggungjawaban BMN oleh unit-unit akuntansi, baik sebagai entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.

Agar data akuntansi yang dihasilkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dapat diandalkan perlu dilakukan prosedur rekonsiliasi untuk ketelitian dan akurasi pencatatan data akuntansi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi menyatakan bahwa sistem pengendalian intern yang andal harus diciptakan prosedur rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan (tanpa analisa) data transaksi keuangan yang diproses dalam beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama dan merupakan salah satu kunci utama dalam upaya penyusunan

laporan keuangan serta berperan penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan. Adapun jenis-jenis Rekonsiliasi:

1. Rekonsiliasi Internal pada Kementerian Negara/Lembaga;
2. Rekonsiliasi Data antara SAU dan SAI;
3. Rekonsiliasi Internal pada Bendahara Umum Negara

Selanjutnya Pelaporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas, yang harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/ Lembaga menghasilkan laporan keuangan yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran adalah : Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2. Neraca adalah : Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu. Yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi aset, kewajiban, dan ekuitas dana.
3. Catatan atas Laporan Keuangan adalah : Laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan, atau daftar terinci, dan atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK meliputi penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Tujuan penyajian CaLK adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

Selanjutnya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB) Provinsi Bengkulu selaku Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Koordinator Kuasa BUN Daerah, demikian juga halnya dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerima dana DK/TP wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L) Tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran dan Barang Tingkat Wilayah DK/TP (UAPPA/B-W DK/TP) semester dan tahunan ke Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu.

Sesuai PMK Nomor: 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, karena sifat pengadaannya non fisik maka mulai Tahun Anggaran 2011 semua transaksi pengadaan BMN dana DK dicatat sebagai Persediaan, sedangkan pengadaan BMN dana TP dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta kegiatan fisik lain (barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk), namun dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan TP, sebagian kecil dana TP dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya, yang dilakukan dengan mekanisme Belanja Barang Penunjang Kegiatan Tugas Pembantuan

dicatat dengan perkiraan Persediaan. Lebih lanjut sesuai PMK Nomor: 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, maka BMN dana DK/TP dapat dihibahkan menjadi BMD. Sehingga dalam dalam Neraca per 31 Desember 20XX akan terlihat :

Neraca Konsolidasi
SKPD DK Tingkat Wilayah UAPPA/B-W DK
Per 31 Desember 2012
(Dalam Rupiah)

Wilayah/Propinsi : 2600 Propinsi Bengkulu
Jenis Kewenangan : DK (Dekonsentrasi)

PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -
Persediaan	Rp -
JUMLAH ASET LANCAR	Rp -
ASET TETAP	
JUMLAH ASET TETAP	
ASET LAINNYA	
JUMLAH ASET LAINNYA	
JUMLAH ASET	Rp -
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	Rp -
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Rp -
JUMLAH KEWAJIBAN	Rp -
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Persediaan	Rp -
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	Rp -
EKUITAS DANA INVESTASI	
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	
JUMLAH EKUITAS DANA	Rp -
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	Rp -

Neraca Kosolidasi
SKPD TP Tingkat Wilayah UAPPA/B-W TP
Per 31 Desember 2012 (Dalam Rupiah)

Wilayah/Propinsi : 2600 Propinsi Bengkulu
Jenis Kewenangan : TP (Tugas Pembantuan)

PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp -
Persediaan	Rp -
JUMLAH ASET LANCAR	Rp -
ASET TETAP	
Tanah	Rp -
Peralatan dan Mesin	Rp -
Gedung Dan Bangunan	Rp -
Gedung Dan bangunan Sebelum Disesuaikan	Rp -
Jalan, Dan Jembatan, Jaringan	Rp -
Aset Tetap Lainnya	Rp -
JUMLAH ASET TETAP	Rp -
ASET LAINNYA	
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	Rp -
Aset Tidak Berwujud	Rp -
JUMLAH ASET LAINNYA	Rp -
JUMLAH ASET	Rp -
KEWAJIBAN	
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	
Uang Muka dari KPPN	Rp -
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	Rp -
JUMLAH KEWAJIBAN	Rp -
EKUITAS DANA	
EKUITAS DANA LANCAR	
Cadangan Persediaan	Rp -
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR	Rp -
EKUITAS DANA INVESTASI	
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	Rp -
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	Rp -
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI	Rp -
JUMLAH EKUITAS DANA	Rp -
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	Rp -

Dalam pelaksanaannya, walaupun pemberian dana DK/TP kepada daerah menunjukkan nilai yang cukup tinggi, peraturan tentang pelaksanaannya sudah ditetapkan, namun demikian dalam implementasi di daerah penerima dana DK/TP masih terlihat belum sempurna, hal tersebut tergambar dari Laporan Keuangan SKPD DK/TP Tingkat Wilayah UAPPA/B-W DK/TP Tahun Anggaran 2012 yang disampaikan ke Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu.

Dari hasil evaluasi atas BMN dana DK lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu, di Neraca Konsolidasi Tahun Anggaran 2012 SKPD DK Tingkat Wilayah SKPD UAPPA/B-W DK yang merupakan gabungan Neraca SKPD UAPPA/B-W DK lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu masih tergambar perkiraan-perkiraan diluar perkiraan Peresediaan, hal tersebut menggambarkan SKPD penerima dana DK belum melakukan proses hibah dari BMN menjadi BMD.

Dari data dan fakta yang ada, SKPD DK Tingkat Wilayah UAPPA/B-W DK lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu yang berjumlah 38 (tiga puluh delapan) SKPD DK Tingkat Wilayah UAPPA/B-W DK dengan 76 (tujuh puluh enam) SKPD Tingkat Satuan Kerja UAKPA/B DK, setelah dilakukan evaluasi maka sebanyak 20 (dua puluh) SKPD DK Tingkat Wilayah UAPPA/B-W DK dengan 23 (dua puluh tiga) SKPD DK Tingkat Satuan kerja UAKPA/B DK sudah sesuai dengan ketentuan, sedangkan sebanyak 18 (delapan belas) SKPD DK Tingkat Wilayah UAPPA/B-W DK dengan 53 (lima puluh tiga) SKPD Tingkat Satuan Kerja UAKPA/B DK masih belum sesuai atau menyalahi ketentuan.

Sama halnya, walaupun sifat dari pendanaan Tugas Pembantuan menghasilkan aset tetap, dan tertuang di dalam neraca sesuai dengan jenis perkiraan belanja peruntukannya, maka berdasarkan hasil evaluasi atas Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2012 SKPD Tingkat Wilayah UAPPA/B-W TP masih tergambar BMN dana TP perolehan Tahun Anggaran 2012 yang belum dihibahkan menjadi BMD, serta masih dapat diidentifikasi BMN dana TP perolehan Tahun Anggaran 2011 dan BMN perolehan sebelum Tahun Anggaran 2011 masih tergambar di Neraca Konsolidasi per 31 Desember 2012 SKPD TP Tingkat Wilayah UAPPA/B-W TP, yang diakibatkan belum dilaksanakannya hibah BMN menjadi BMD.

Dari data dan fakta yang ada SKPD TP Tingkat Kanwil UAPPA/B-W TP lingkup Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu ada sebanyak 36 (tiga puluh enam) UAPPA/B-W TP dengan jumlah UAKPA/B TP sebanyak 45 (empat puluh lima) satuan kerja, setelah dievaluasi sebanyak 18 (sembilan belas) UAPPA/B-W TP dengan 18 (delapan belas) SKPD Tingkat Satuan kerja UAKPA/B-W TP sesuai dengan ketentuan dan sebanyak 18 (tujuh belas) UAPPA/B-W DK/TP dengan 27 (dua puluh tujuh) SKPD Tingkat Satuan kerja UAKPA/B-W TP yang menyalahi ketentuan, termasuk didalamnya SKPD TP Tingkat Wilayah UAPPA/B-W TP yang melakukan belum hibah BMN perolehan Tahun Anggaran 2012 menjadi BMD.

Sehingga dalam evaluasi yang dilakukan dapat disimpulkan, bahwa mekanisme pengelolaan Brang Milik Negara (BMN) dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan (DK/TP) belum secara keseluruhan berjalan sesuai dengan peraturan, hal ini tergambar dari laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DK/TP Tingkat Wilayah UAPPA/B-W DK/TP Tahun Anggaran 2012 yang disampaikan ke Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu, setelah dikonsolidasikan terdapat perkiraan-perkiraan dalam tabel dibawah ini :

Jenis Perkiraan
BMN Dana DK/TP Yang Masih Tergambar Pada Neraca
SKPD DK/TP Tingkat Wilayah UAPPA/B-W DK/TP T.A. 2012

NO.	JENIS PERKIRAAN	NILAI	
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	94.550.000,00
2	Persediaan	Rp	4.247.338.654,00
3	Tanah	Rp	7.629.838.275,00
4	Peralatan dan Mesin	Rp	38.530.189.590,00
5	Gedung dan Bangunan	Rp	36.723.804.391,00
6	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	23.093.749.425,00
7	Aset Tetap Lainnya	Rp	3.588.836.346,00
8	Dana yang Dibatasi Pemakaiannya	Rp	957.977.884,00
9	Aset Lain-lain	Rp	24.469.832.452,00
10	Aset Tidak Berwujud	Rp	4.500.714.940,00
Total		Rp	143.836.831.957,00

Sumber : Neraca SKPD DK/TP Tingkat UAPPA/B-W DK/TP Tahun Anggaran 2012

Perkiraan-perkiraan tersebut seharusnya sudah tidak tergambar dalam Neraca Konsolidasi Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) DK/TP Tingkat Wilayah (UAPPA/B-W DK/TP) lingkup Kantor Wilayah DJPB Provinsi Bengkulu setelah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas PMK Nomor: 156/PMK.07/2008 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dan PMK Nomor: 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi Dana Tugas Pembantuan Sebelum Tahun Anggaran 2011.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2011, *Sinerji Pusat dan Daerah, Buku Pegangan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2011*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2007. Jakarta: *Bahan Ajar DTTS/Prinsip dan Teknik Manajemen Kekayaan Negara*.

Arif: Bahtiar: Muclis: Iskandar, 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Salemba Empat. Jakarta.
Kamaludin, 2011. *Manajemen Keuangan, "Konsep Dasar dan Penerapannya"*. Bandung: Mandar Maju.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010, *Standar Akuntansi Pemerintahan, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan*, (dalam PP No. 71/2010)

Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, 2004. *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, 2004. *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah*, Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Mahmudi, 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo, 2004. *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi dan Sasaran*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Myer, 1995. *Financial Statement Analysis*, Prentice-Hall: New Jersey Prentice-Hall.

Nordiawan, Deddi: Putra, Sondi, Iswahyudi: Rahmawati, Maulidah. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat. Jakarta.

Renyowijoyo, Muindro, (2008). *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media. Jakarta.

Sofyan Syafri, 1995. *Budgeting Penganggaran Perencanaan Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Jakarta.

Anonim, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Anonim, 2004. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Anonim, 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Anonim, 1999. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah

Anonim, 2004. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Anonim, 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Anonim, 2005. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;

Anonim, 2000. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Anonim, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

Anonim, 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

- Anonim, 2006. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Anonim, 2008. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Anonim, 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
- Anonim, 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011;
- Anonim, 2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010;
- Anonim, 2009. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Anonim, 2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
- Anonim, 2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
- Anonim, 2011. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Sebelum Tahun 2011
- Anonim, 2010. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-36/PB/2010 tentang Pedoman Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara;
- Anonim, 2010. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- Anonim, 2009. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.